

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind Hill, 1992.

Bagir Manan and Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: Penerbit Alumni, 1997.

Bernard L. Tanya. *“Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama.”* Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi. *“Penelitian Hukum (Legal Research).”* Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *“Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum.”* Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Fristiana Irina. *“Metode Penelitian Terapan.”* Yogyakarta: Penerbit Parama Ilmu, 2017.

I Made Pasek Diantha. *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif.”* Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Imam Syaukani and A. Ahsin Thohari. *“Dasar-Dasar Politik Hukum.”* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Joenadi Efendy and Johnny Ibrahim. *“Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.”* Depok: Prenada Media Group, 2018.

Lutfil Ansori. *“Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.”* Malang: Setara Press, 2018.

Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Muhammad Shoim. *"Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia"*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.

Ni'matul Huda, and R. Nazriyah. *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2017.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Sovia, Sheyla Nichlatus, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh, Pandi Rais, Moch Choirul Rizal, et al. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.

JURNAL :

Al Asy'arie, Mohammad Asadullah Hasan, and Widhi Handoko. "Rasio Legis Perbuatan Tercela Sebagai Dasar Pemberhentian Sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah." *Notarius* 16, no. 2 (August 2023).

Asmara, Galang. *Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*. 2022.

Aulil Amri. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (May 2020).

Aurora Vania Crisdi Gonadi, and Gunawan Djadjaputra. "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023." *UNES Law Review* 6, no. 1 (October 2023).

- Bintang Ulya Kharisma. “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?” *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (June 2023).
- Daus, Candra Refan, and Ismail Marzuki. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia.” *Al-’Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 2023).
- Dewi, Dyah Adriantini Sintha. “Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan.” *Yustisia* 5, no. 1 (April 2016).
- Dewi Taneo. “Konsep Pasangan Seiman Menurut 2 Korintus 6:14-15 dan Implikasinya Terhadap Pencegahan Perkawinan Beda Agama.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik* 2, no. 3 (July 2024).
- Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri. “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Universitas Darussalam Gontor* 3 (2020).
- Ghazali, T. “Pernikahan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (June 2024).
- Hartini, Sri, Budiyono Budiyono, Siti Kunarti, Tenang Haryanto, Suyadi Suyadi, and Kartono Kartono. “Penerapan Asas Freies Ermessen Dalam Pengambilan Kebijakan Oleh Administrasi Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara.” *Soedirman Law Review* 5, no. 4 (2022).
- Irwan Adi Cahyadi. “Jurnal Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia.” *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014.

Lysa Setiabudi. "Analisis Perkawinan Beda Agama Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Izin Perkawinan Beda Agama." *UNNES*, 2016.

Mangiri, Juweni, Lisma Lumentut, and Poppy Andilolo. "Pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *ojs.ukipaulus.ac.id*, 2023.

Muharrir, Jefrie Maulana, and Muhammad Nahyan Zulfikar. "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (October 2023).

Novita Lestari. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (July 2018).

Nurfaqih Irfani. *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*. 16, no. 3 (2020).

Rihdo, Maulana, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, and Fauziah Putri Meilinda. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (October 2023).

Sinaga, Fierda, Rosnidar Sembiring, Maria Kaban, and Idha Aprilyana Sembiring. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik

Dihubungkan Dengan Undang- Undang tentang Perkawinan.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 12 (December 2023).

Triono, Fathul Mu’in, Relit Nur Edi Rudi Santoso, and Arif Fikri. “Sema Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Pencegahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* Vol. 5, No. 2 (2024).

Universitas Medan Area. “Apa itu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).” December 8, 2023.

Wistina Semeru, Edi Sumarwan, and Virna Dita Pratiwi. “Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Agama Buddha.” *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 2 (November 2023).

Woen, Victoria. “Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan Yang Tidak Seiman.” *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, dan Pendidikan* 4, no. 1 (June 2020).
<https://doi.org/10.51730/ed.v4i1.34>.

PUTUSAN :

“Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr.” 2023. August 2023.

“Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.” 2013. 2013.

Putusan Nomor 71/PUU-XX/2022

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan
Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Jenis Peraturan Perundang-Undangan
Selain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Persyaratan
Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2006

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

SURAT EDARAN :

SEMA Nomor 01 Tahun 1951

SEMA Nomor 02 Tahun 2023

WEBSITE :

2 Korintus 6:14. Patent 55/56 M, issued 55/56 M.

Kan. 1086 Kitab Hukum Kanonik 1983 Bab VI Tentang Perkawinan Campur.
issued 1983.

Insan Khoirul Qolbi. “Menyoal Norma Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama?” In *Menyoal Norma Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama*. Kemenag.go.id, July 29, 2023.
<https://kemenag.go.id/kolom/menyoal-norma-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-0ki1C>.

lsd.law. *Legal Definitions Ratio Legis*. 2025. <https://lsd.law/define/ratio-legis>.

TESIS :

Syahputra, Ali. “Tinjauan Politik Hukum Islam Terhadap Sema Nomor 2 Tahun 2023.” Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

SKRIPSI :

M. Iqbaluddin Ramadhani. “Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan Ditinjau dari Prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.” Skripsi, IAIN Kediri, 2024.